

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
 INSTANSI : PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
 TAHUN : 2021

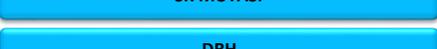
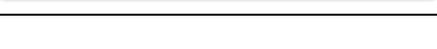
PENILAIAN		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindak Lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
A. PROSES (60)								
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)		5.0		5.00	100.00%			
1	Tim Kerja (1)	1.0		1.00	100.00%			
	a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri Palembang Telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas	<p>DOKUMEN RAPAT</p> <p>HASIL RAPAT PEMBENTUKAN TIM</p> <p>DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA TIM</p>	Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
	b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?		A/B/C	A	1	Penentuan Anggota Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Palembang telah melalui prosedur dan mekanisme yang Jelas	<p>BERITA ACARA HASIL SELEKSI TIM</p> <p>DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA TIM BARU</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>SK TIM PEMBANGUNAN ZI</p>	a. Dengan prosedur/mechanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1.0		1.00	100.00%			
	a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1	Pengadilan Negeri telah membuat Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Negeri Palembang	<p>DOKUMEN RAPAT PENYUSUNAN RENJA</p> <p>DOKUMEN RENCANA KERJA ZI 2020</p> <p>DOKUMEN RENCANA KERJA ZI 2021</p>	Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
	b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A/B/C	A	1	Semua Target-target prioritas Pengadilan Negeri Palembang telah relevant dengan WBK /WBBM	<p>TARGET-TARGET RENJA</p> <p>SK PENETAPAN RENJA</p>	a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
	c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1	Media sosialisasi WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Palembang melalui Media cetak (koran), Layar Informasi Spanduk dan Sosialisasi	<p>PUBLIKASI WEBSITE</p> <p>PUBLIKASI SPANDUK</p> <p>PUBLIKASI MEDIA CETAK</p> <p>DOKUMEN SOSIALISASI ZI</p>	Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	2.0		2.00	100.00%			

	a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	A/B/C/D	A	1		Semua Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	<p>LAPORAN PELAKSANAAN ZI</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 1</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 2</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 3</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 4</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 5</p> <p>DOKUMENTASI KEGIATAN AREA 6</p> <p>HASIL REVIEW ZI</p>	<p>a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;</p> <p>b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;</p> <p>c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;</p> <p>d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana</p>
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Palembang telah ditindaklanjuti per bulan	<p>DOKUMEN RAPAT MONEV</p> <p>LAPORAN MONEV AREA</p>	<p>a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;</p> <p>b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;</p> <p>c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan</p>
	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	A/B/C/D	A	1		Semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Palembang telah ditindaklanjuti	<p>TINDAK LANJUT MONEV</p>	<p>a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;</p> <p>b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;</p> <p>c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;</p>

	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)	1.0			1.00	100.00%			
		a. Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?		Y/T	Ya	1		Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberi teladan nyata contoh nyata KPN/WKPN memantau laporan Disiplin kehadiran Hakim dan pegawai setiap hari, melakukan upacara dan apel pagi/sore, KPN/WKPN membuat laporan kepatuhan terhadap jalannya tupoksi kepada Dirjen Badilum/Sekretaris MA	<p>DAFTAR HADIR PIMPINAN</p> <p>FOTO KEGIATAN UPACARA - APEL</p>	Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
		b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?		Y/T	Ya	1		Agen perubahan sudah ditetapkan melalui SK KPN Palembang Tentang Penunjukan Agen Perubahan dilingkungan Pengadilan Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020.	<p>SK AGEN PERUBAHAN</p> <p>DAFTAR RIWAYAT HIDUP AGEN PERUBAHAN</p>	Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
		c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui penerapan budaya 3S (salam,senyum,sapa) dan 5R (rapi,resik,rawat,rajin & ringkas) serta melakukan upacara, apel pagi dan sore	<p>BANNER BUDAYA KERJA</p> <p>REKAP DAFTAR HADIR PEGAWAI</p> <p>SOSIALISASI BUDAYA KERJA</p>	Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
		d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A/B/C/D	A	1		Seluruh Jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari Seluruh jajaran diakomodasikan dalam keputusan Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI)	<p>DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS</p> <p>FOTO KEGIATAN</p> <p>KEGIATAN AREA 1</p> <p>KEGIATAN AREA 2</p> <p>KEGIATAN AREA 3</p> <p>KEGIATAN AREA 4</p> <p>KEGIATAN AREA 5</p> <p>KEGIATAN AREA 6</p>	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
II.		PENATAAN TATALAKSANA (5)	5.0			5.00	100.00%			
	1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1.5			1.50	100.00%			

		a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A/B/C/D	A	1		Semua Unit SOP pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras	SOP SATUAN KERJA	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
		b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	A/B/C/D	A	1		Unit pada Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan	ALUR LAYANAN PTSP PROSES BISNIS PN PALEMBANG FOTO KEGIATAN LAYANAN DI PTSP	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
		c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A/B/C/D	A	1		Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri Palembang telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	REVIEW SOP	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
		2 E-Office (2)	2.0		2.00	100.00%			
	 Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Palembang telah menggunakan aplikasi SIPP, MIS, dan SIKEP	APLIKASI SIPP APLIKASI MIS APLIKASI SIWAS APLIKASI BMN SAIBA APLIKASI SAS APLIKASI SIKPERMASI APLIKASI PERSEDIAAN	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
		b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Palembang Telah Menggunakan aplikasi SIKEP	APLIKASI SIKEP APLIKASI KOMDANAS APLIKASI CUTI ONLINE	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi

		c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1		Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Palembang Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Siwas, Apliasi PTSP, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-Tilang	<p>APLIKASI PTSP</p> <p>ANTRIAN PTSP</p> <p>WEBSITE PN PALEMBANG</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>JADWAL SIDANG</p> <p>APLIKASI AMPERA</p> <p>APLIKASI E-COURT</p> <p>APLIKASI E-TILANG</p> <p>APLIKASI SIBANGJAYO</p> <p>APLIKASI PERSURATAN</p>	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
		d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Negeri Palembang telah dilakukan per bulan	<p>MONEV IT</p>	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
3		Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	1.5		1.50	100.00%			
		a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Y/T	Ya	1		kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Palembang sudah diterapkan	<p>PUBLIKASI DIPA</p> <p>BIAYA PERKARA</p> <p>PENANGANAN PENGADUAN</p> <p>MONITOR REALISASI DIPA</p> <p>APLIKASI SAKTI</p> <p>AUDIO GRATIFIKASI</p> <p>WEBSITE PN PALEMBANG</p>	Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Y/T	Ya	1		Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan keterbukaan informasi publik	  	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)			15.0			14.75	98.33%			
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)	2.0			2.00	100.00%			
		a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Ya	1		Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	    	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
		b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	A	1		Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen Pengadilan Negeri Palembang telah murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	 	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada
		c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Ya	1		Sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	 	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
	2	Pola Mutasi Internal (2)	2.0			2.00	100.00%			
		a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Ya	1		Telah Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Palembang dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai	   	Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

		b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	A/B/C/D	A	1		Semua mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Palembang telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	<p>DOKUMEN BAPERJAKAT</p> <p>SK MUTASI</p> <p>DRH</p>	<p>a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;</p> <p>b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;</p> <p>d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi</p>
		c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	Y/T	Ya	1		Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	<p>MONEV MUTASI INTERNAL</p>	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)	3.0		3.00	100.00%			
		a. Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi ?	Y/T	Ya	1		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi yang merupakan kewenangan Tugas dan fungsi Balitbang Badan Diklat Mahkamah Agung R.I.	<p>DOKUMEN RAPAT KEBUTUHAN PELATIHAN</p> <p>DOKUMEN RENCANA PELATIHAN</p>	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
		b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A/B/C/D	A	1		semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;	<p>RENCANA DIKLAT</p> <p>KEBUTUHAN DIKLAT</p>	<p>a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai</p>

		c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A/B/C/D	B	0.67		persentase kesenjangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%	FITUR KOMPETENSI PADA APLIKASI SIKEP	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
		d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A/B/C/D	A	1		Seluruh pegawai di Unit Kerja Pengadilan Negeri Palembang telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dengan mengajukan di usukan untuk mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis, Diklat PIM III, IV kepada Badan Diklat Mahkamah Agung R.I.	PEMBERITAHUAN PELATIHAN	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
		e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	USULAN DIKLAT DAFTAR DIKLAT PEGAWAI LAPORAN DIKLAT	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
		f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan Tahunan (Laporan Tahunan 2018 dari Sub Bagian Kepegawaian dan Renstra PT. Palembang)	MONEV PELATIHAN	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
4		Penetapan kinerja individu (4)	4.0		3.75	93.75%			

		a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1	Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan	 	<p>a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p>
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		<p>a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p>

		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A/B/C/D/E	B	0.75		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan	<p>SKP</p> <p>PERJANJIAN KINERJA</p>	<p>a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan</p> <p>b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan</p> <p>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran</p> <p>d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan</p> <p>E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		A/B/C/D	A	1		Hasil penilaian kinerja individu pada Pengadilan Negeri Palembang telah dijadikan dasar melalui pemberian reward	<p>DOKUMEN RAPAT</p> <p>PENERIMA PENGHARGAAN</p> <p>KINERJA PEGAWAI</p>	<p>a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward</p> <p>b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward</p> <p>c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward</p> <p>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward</p>
	5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	3.0			3.00	100.00%			
		a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	<p>SOSIALISASI KODE ETIK & ATURAN DISIPLIN</p> <p>REKAP DAFTAR HADIR</p> <p>DAFTAR HADIR APEL</p> <p>SANKSI DISIPLIN</p> <p>SK JAM KERJA</p> <p>SK PAKAIAN KERJA</p>	<p>a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.</p> <p>b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi</p>
	6.	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	1.0			1.00	100.00%			
		a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.		A/B/C/D	A	1		Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan	<p>APLIKASI SIKEP TERUPDATE</p>	<p>a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan;</p> <p>b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan;</p> <p>c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran;</p> <p>d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan</p>
IV. Penguatan Akuntabilitas (10)			10.0			10.00	100.00%			
	1	Keterlibatan pimpinan (5)	5.0			5.00	100.00%			

		a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		Y/T	Ya	1		Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Palembang terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	<p>RAPAT PENYUSUNAN ANGGARAN</p> <p>RAPAT BULANAN</p> <p>DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN</p>	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
		b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Y/T	Ya	1		Ya, pimpinan pada Pengadilan Negeri Palembang telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	<p>DOKUMEN RAPAT PERJANJIAN KINERJA</p> <p>PERJANJIAN KINERJA</p>	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
		c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		Y/T	Ya	1		Ya, pimpinan pada Pengadilan Negeri Palembang telah memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui rapat bulanan	<p>DOKUMEN RAPAT BULANAN</p> <p>DOKUMEN PEMANTAUAN KINERJA</p>	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
2		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5.0			5.00	100.00%			

		a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	A/B/C	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen SAKIP terlampir) dan telah di upload Aplikasi E-SAKIP	<p>RENJA</p> <p>RENCANA STRATEGIS</p> <p>PENETAPAN KINERJA</p>	<p>a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;</p> <p>b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;</p> <p>c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan</p>
		b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	A/B/C/D	A	1		Dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Palembang telah berorientasi hasil	<p>TURUNAN RENJA</p>	<p>a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;</p> <p>b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;</p> <p>c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;</p> <p>d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil</p>
		c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	A/B/C	A	1		Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKU Tambahan	<p>INDIKATOR KINERJA UTAMA</p> <p>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</p>	<p>a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;</p> <p>b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;</p>

		d. Apakah indikator kinerja telah SMART	A/B/C/D	A	1		Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART	<p>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN SMART</p> <p>LAPORAN HASIL EVALUASI LKJIP</p>	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang
		e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Y/T	Ya	1		Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu	<p>DOKUMEN PENGIRIMAN LKJIP</p>	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
		f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C/D	A	1		Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja	<p>LKJIP PN PALEMBANG</p>	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
		g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1		Mengikutsertakan SDM Pada Subagian Program dan Anggaran untuk Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusdiklat Mahkamah Agung R.I.	<p>SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP</p>	a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
		h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A/B/C	A	1		SDM yang telah memiliki sertifikat DIKLAT teknis perencanaan	<p>DAFTAR PETUGAS PERENCANAAN DILAT LKJIP</p>	a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
V. Penguatan Pengawasan (15)			15.0			15.00	100.00%		
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3.0			3.00	100.00%		
		a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	A/B/C	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan Public campaign secara berkala melalui banner larangan gratifikasi dan Liputan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas melalui media cetak	<p>SOSIALISASI GRATIFIKASI</p> <p>BANNER GRATIFIKASI</p>	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign

		b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A/B/C	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>SK TIM GRATIFIKASI</p> <p>KAMERA CCTV</p> <p>PETA JALUR STERIL</p> <p>RUANG TAMU TERBUKA</p> <p>PINTU AKSES</p> <p>REKAP LHKPN</p>	<p>a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;</p> <p>b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi</p>
2	Penerapan SPIP (3)		3.0			3.00	100.00%			
		a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>DOKUMEN SOSIALISASI SPIP</p> <p>NOTULEN SPIP</p> <p>SK SATGAS SPIP</p> <p>LAPORAN PENGAWASAN & MONITORING PTSP</p>	<p>a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p>

		b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	A/B/C/D	A	1		Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>ANALISIS RISIKO</p> <p>MATRIK RISIKO</p> <p>MANAJEMEN RISIKO</p>	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A/B/C	A	1		Jika unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO</p>	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A/B/C	A	1		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	<p>DOKUMEN RAPAT BULANAN</p> <p>DOKUMEN SIDAK</p> <p>DOKUMEN APEL</p>	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
	3	Pengaduan Masyarakat (3)	3.0		3.00	100.00%			
		a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>SK PETUGAS MEJA PENGADUAN</p> <p>PETUGAS & KOTAK PENGADUAN</p> <p>INFORMASI LAYANAN PENGADUAN</p> <p>SARANA PENGADUAN MELALUI APLIKASI SIWAS</p>	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat
		b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Palembang	<p>BUKU REGISTER PENGADUAN</p> <p>NOTA DINAS/DISPOSISI ATAS PENGADUAN</p>	a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	A	1		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan	 	<p>a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;</p> <p>d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan</p>
		d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C	A	1		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja</p>
	4	Whistle-Blowing System (3)	3.0			3.00	100.00%			
		a. Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi ?		Y/T	Ya	1		Whistle Blowing System telah di internalisasi melalui sosialisasi	  	Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja

		b. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p style="text-align: center;">SK WBS</p> <p style="text-align: center;">APLIKASI WBS PADA SIWAS</p>	<p>a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p>
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C/D	A	1		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah dilakukan setiap Bulan	MONITORING & EVALUASI WBS	<p>a. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan bulanan;</p> <p>b. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan triwulan;</p> <p>c. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan semesteran;</p> <p>d. Jika evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dilakukan tahunan</p>
		d. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Palembang	TINDAK LANJUT MONITORING & EVALUASI WBS	<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah</p>
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3.0		3.00	100.00%			
		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Y/T	Ya	1		Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN	Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
		b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A/B/C/D	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja	SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke</p>

		c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	1		penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja	SURAT PERNYATAAN BEBAS BENTURAN	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja</p>
		d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C	A	1		Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja Pengadilan Negeri Palembang	MONITORING BENTURAN KEPENTINGAN	<p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja</p>
		e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Palembang	LAPORAN TINDAK LANJUT BENTURAN KEPEN	<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang</p>

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)		10.0			10.00	100.00%			
	1	Standar Pelayanan (3)	3.0			3.00	100.00%		
		a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A/B/C	A	1			<p>Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>SK STANDAR PELAYANAN</p> <p>DOKUMEN STANDAR PELAYANAN</p>	<p>a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;</p> <p>b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan</p>
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A/B/C/D	A	1			<p>Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>MAKLUMAT PELAYANAN</p>	<p>a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p>
		c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A/B/C/D	A	1			<p>Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>SOP PELAYANAN</p>	<p>a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</p> <p>c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p>
		d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	A/B/C	A	1			<p>Unit kerja Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP</p> <p>REVIU SOP PELAYANAN</p>	<p>a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;</p> <p>c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP</p>
	2	Budaya Pelayanan Prima (3)	3.0			3.00	100.00%		

		a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	A/B/C/D	A	1		Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	<p>DOKUMEN PELATIHAN PETUGAS PTSP</p> <p>SOSIALISASI PETUGAS PTSP</p>	<p>a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p>
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A/B/C	A	1		Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)	<p>PUBLISH PTSP</p> <p>FOTO PTSP</p> <p>MEDIA SOSIAL</p> <p>ALUR PTSP</p>	<p>a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)</p> <p>b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)</p> <p>c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media</p>
		c. Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C	A	1		Pada Pengadilan Negeri Palembang Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.	<p>PEMBERIAN REWARD</p> <p>PEMBERIAN PUNISMENT</p>	<p>a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan</p> <p>b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan</p> <p>c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar</p>
		d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	1		Telah terdapat sarana layanan terpadu yaitu dengan terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),	<p>PTSP</p> <p>SARANA & PRASARANA PTSP</p>	<p>a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu</p> <p>d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu</p>

		e. Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	A	1		Telah terdapat inovasi pelayanan seperti Apiikasi E-Tilang, Aplikasi Ampera dan Aplikasi E-Court	    	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
	3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	4.0			4.00	100.00%			
		a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1		Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,66 yang berada pada kategori "SANGAT BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Palembang.		a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
		b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	A	1		Hasil survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Negeri Palembang		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	A	1		Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Tahun 2018		a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT			60.0			59.75				
B. HASIL (40)										
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)			20.0			18.80	94%			
	1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15.0	0-4	3.68	13.80	92.00%			Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
	2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5.0	0-100%	100	5.00	100.00%			
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)			20.0			18.10	91%			

			1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (2	20.0	0-4	3.62	18.10	90.50%		Nilai Persepsi Kualitas pelayanan (indeks Kepuasan Masyarakat) pengadilan Negeri Palembang = 90,50%	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
				TOTAL HASIL	40.0			36.90	0.9225			
				NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				96.65				